



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RATIH MAYANGSARI

2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEMARITIMAN, PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN

3. NHK : 415705

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 15.130.690.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 537 m²/400 m² di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA UTARA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 13.831.059.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m²/45 m² di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 264.352.000

3. Tanah Seluas 1.584 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 624.096.000

4. Tanah Seluas 350 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 227.500.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m²/75 m² di KAB / KOTA KOTA
BEKASI , HIBAH TANPA AKTA Rp. 183.683.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 273.400.000

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
270.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 3.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 840.140.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 426.278.650

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.331.737.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

**Sub Total**

III. HUTANG	Rp.	19.002.245.650
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.000.000
	Rp.	18.995.245.650

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.